



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Rekan DD Wayhawang Diperiksa**

**Proyek Tahun 2017**

**KOTA BINTUHAN** - Penyidik Unit Tipikor Polres Kaur memeriksa rekan yang mengerjakan proyek pembangunan dengan menggunakan dana desa (DD) di Desa Wayhawang tahun 2017 lalu. Yang pertama adalah Buyung Farizal yang mengerjakan pembukaan jalan baru dan Sapawi yang mengerjakan telford.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui aliran DD tersebut. Serta membuktikan kalau pekerjaan DD tersebut di pihak ketigakan atau tidak dikerjakan oleh masyarakat. Apalagi

pekerjaan dan pembangunan jalan tersebut dibebankan kepada DD dengan nilai yang tidak sedikit. Akan tetapi pekerjaan tidak sesuai harapan masyarakat.

Sejauh ini sudah sembilan saksi yang diperiksa dalam pengusutan korupsi DD Desa Wayhawang ini. Pemeriksaan saksi masih terus berlanjut. Polisi belum menetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas kerugian Negara dari pengelolaan DD itu.

"Pemeriksaan hari ini khusus untuk pihak ketiga dan sudah kita lakukan ternyata benar kalau pembukaan jalan baru dengan telford tersebut

dikerjakan oleh pihak ketiga. Padahal jelas-jelas DD itu dikerjakan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama. Dan ini akan terus kita dalam lagi," terang Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman.

Terkait pekerjaan DD Wayhawang tahun 2017 berdasarkan hasil audit BPK dan Inspektorat Kaur merugikan negara Rp 280 juta lebih. Setelah diberikan waktu 60 hari, tidak ada pengembalian kerugian Negara itu oleh mantan Kades Wayhawang Mi. Sehingga kasus ini naik ke penyidikan. hingga saat ini sudah ada 9 saksi

yang diperiksa termasuk salah satu pemasok material ke desa tersebut yaitu Lesta.

Kerugian negara Rp 280 juta lebih tersebut didapat dari kekurangan volume pada pembuatan jalan sentral produksi dan juga telford Rp 232 juta lebih. Kemudian ada selisih belanja BBM Rp 49,7 juta, kekurangan bayar pajak sewa buldozer Rp 1 juta. Kemudian ada juga kekurangan pajak sewa eksavator Rp 562 ribu. Kemudian ada tiga item belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti yang totalnya mencapai Rp 51 juta lebih. (cik)